BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat adalah dengan menuntut transparansi dan akuntabilitas publik untuk semua aktivitas birokrasi mulai dari tahap pelaporan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, peraturan dan kebijakan tambahan dibuat untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah (Nirwana & Haliah, 2018). Memberikan laporan pertanggungjawaban adalah salah satu upaya nyata untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah (Nirwana & Haliah, 2018); (A. R. Safitri et al., 2021).

Penelitian oleh Safitri & Zulkarnain (2021) menyatakan bahwa hasil laporan keuangan akan disampaikan kepada pihak-pihak yang diperlukan, baik internal maupun eksternal. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah kewajiban sektor publik. Menurut Sukarman & Solovida (2021), informasi laporan keuangan daerah bermanfaat bagi pengguna saat diperlukan karena digunakan oleh pihak internal dan eksternal yang membutuhkan untuk membuat keputusan. Untuk mencapai hal ini, laporan keuangan yang berkualitas diperlukan, yang mencakup hasil laporan keuangan pemerintah secara menyeluruh. Berbagai komponen, seperti

pengawasan internal, penggunaan TI, dan kualitas sistem, dapat memengaruhi laporan keuangan yang baik (Kusnadi et al., 2022). Dalam hal ini tentunya opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat *legit* dalam menggambarkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Medan beserta sumber dari segala faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan itu sendiri, dan predikat WTP tidak menjamin bahwa suatu lembaga/institusi terhindar dari kelemahan-kelemahan yang ada pada saat penyusunan laporan keuangan. Dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana & Haliah (2018); (Riandani, 2019).

Laporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan, yang bermanfaat bagi mereka yang membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan berkualitas tinggi adalah informasi yang lengkap, jelas, dan tidak menyesatkan (Syafitriani, 2023).

Menurut Mardiasmo (2007), laporan keuangan yang handal menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah yang jujur, dapat dibuktikan, dan netral. Representasi jujur adalah ketika data secara akurat menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang diharapkan untuk disajikan secara wajar. Dapat diverifikasi adalah ketika data dalam laporan keuangan dapat diverifikasi, dan hasil uji yang dilakukan oleh pihak lain masih menghasilkan hasil yang tidak berbeda secara signifikan. Netralitas didefinisikan sebagai data yang dimaksudkan untuk kepentingan umum dan tidak untuk kepentingan pihak tertentu (Ridzal *et al.*, 2022). Menurut Irafah et al. (2020), laporan keuangan memiliki empat dimensi kualitas: dapat dipahami

(*understandability*), relevan (*reliabilitas*), dan keterbandingan (*comparability*) (Sijabat & Virandi, 2023).

Laporan keuangan pemerintah sendiri terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan keuangan ini diperiksa dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sesuai dengan kualitas penyajian data laporan keuangan instansi tersebut. Ini dilakukan untuk menentukan kebijakan yang akan datang (Kuntadi et al., 2022).

Sejalan dengan pernyataan penelitian yang dilakukan Kuntadi et al. (2022), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.

Berdasarkan data BPK, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Sumatera Utara Tahun 2024 bahwa dalam lima tahun terakhir (2019-2023) ini opini LKPD mengalami peningkatan sebesar 0,8 poin persen yaitu dari semula 89,5% di tahun 2019 menjadi 90,3% di tahun 2023. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh WDP mengalami penurunan 0,4 poin persen yaitu dari 9,2% di Tahun 2019 menjadi 8,8% di Tahun 2023 (BPK, 2024). Sedangkan untuk Kota Medan, setiap tahunnya mengalami peningkatan dan perbaikan terhadap laporan keuangan, sehingga BPK memberikan opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak

tahun 2020-2023. Meskipun pada tahun 2017-2019 sempat mendapatkan opini WDP. Tetapi, pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya dengan memanfaatkan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian internalnya. Berikut gambar grafik perkembangan opini LKPD Kota Medan Tahun 2017-2023.

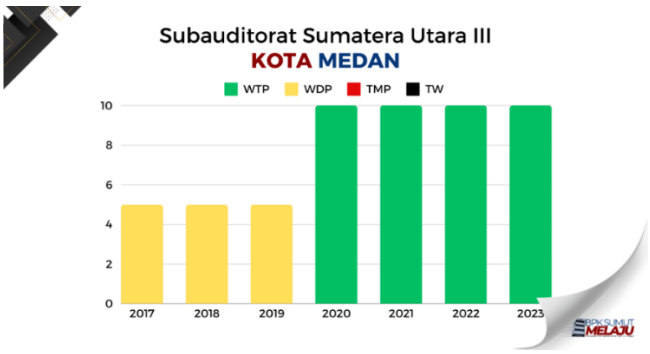

Sumber*:* *www.bpk.go.id*

Gambar 1.1 Perkembangan Opini LKPD Kota Medan

Penggunaan teknologi informasi juga memengaruhi kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi memiliki banyak keuntungan, seperti kecepatan pemrosesan atau transaksi, penyiapan laporan, kemampuan untuk menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalkan kesalahan, dan mengurangi biaya pemrosesan. Akan tetapi, implementasi teknologi informasi akan mahal jika tidak digunakan dengan benar. Hal ini terkait dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, dan sumber daya manusia saat ini tidak memahami teknologi informasi yang diperlukan (Binawati & Nindyaningsih, 2022). Dalam hal ini, Kantor Walikota Medan sedang mengalami migrasi dari aplikasi versi lama menjadi aplikasi versi terbaru yang menyebabkan tidak sedikit aparatur kewalahan dalam men-*transfer*

data keuangan yang mungkin saja bisa berakibat fatal dalam penyusunan laporan keuangan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2018) dan Wahyuningsih (2022)bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Wijayanti, 2018).

Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan membuat laporan keuangan yang berkualitas. Namun, sudah menjadi masalah umum di pemerintahan, terutama pemerintah daerah, bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia seringkali tidak dilakukan dengan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jika sumber daya manusia pemerintah daerah tidak memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan benar, laporan keuangan akan menjadi keliru dan tidak sesuai dengan standar pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, bukan hanya jumlah sumber daya manusia yang diperlukan, tetapi juga kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Dalam hal ini, Kantor Walikota medan selaku penyedia laporan keuangan dari seluruh SKPD yang ada di Kota Medan menyikapi permasalahan ini dengan cukup bijak. Membuat para aparatur bisa kembali mempelajari sekaligus mempraktekkan secara langsung sebuah aplikasi baru yang tengah berjalan, tapi hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa tetap adanya kelemahan yang terdeteksi. Garung (2019) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Dewi, 2021).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah komponen tambahan yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Kurangnya pemahaman

akuntansi tentang cara penyusunan laporan keuangan itu sendiri, penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang tidak efektif, atau kurangnya peran internal audit dapat menjadi faktor kualitas laporan keuangan yang buruk (Taufiqurrohman *et al.*, 2021). Menurut Ernawati & Budiyono (2019), jika pengendalian internal tidak baik, akan sulit untuk menemukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Akibatnya, bukti audit yang diperoleh tidak akan valid. Dan itu sebabnya Pemerintah Kota Medan berusaha untuk selalu memperkuat Sistem Pengendalian Internal demi pertanggungjawaban kinerja aparatur instansi/organisasi kepada publik dalam penyusunan laporan keuangan. Ini sejalan dengan temuan Shofa et al. (2022) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, temuan Imelia et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern tidak bertujuan untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau kecurangan; sebaliknya, sistem yang baik dapat menekan kesalahan dan kecurangan sehingga dapat ditemukan dan diatasi segera (Purwandari, 2024).

Fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 546 LKPD dalam IHPS 1 Tahun 2024, disebutkan bahwa BPK menemukan 5.426 kelemahan SPI, yang meliputi 1.573 (29%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.953 (54%) permasalahn kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 900 (17%)

permasalahan kelemahan struktur pengendalian internal. Komposisi permasalahan tersebut disajikan dalam gambar berikut ini.

Sumber*: www.bpk.go.id*

Gambar 1.2 Komposisi Permasalahan Pengendalian Intern

Menurut data BPK, kasus kelemahan SPI sering terjadi karena kurangnya kecermatan penyajian laporan penyajian keuangan oleh pejabat pelaksana. Selain itu, kurangnya komitmen mengemban amanah, belum sepenuhnya mengerti ketentuan dan kebijakan yang berlaku, belum optimal melakukan pengawasan dan pengendalian yang kurang koordinasi, belum menindaklanjuti secara tuntas dan menyeluruh atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebelumnya (BPK, 2024).

Selain permasalahan kelemahan SPI, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7.845 permasalahan ketidakpatuhan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 5.883 permasalahan sebesar Rp 3,49 triliun (BPK, 2024).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Dewi (2021) dan Safitri et al. (2021). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dilakukan oleh Dewi adalah pada variabel independennya menggunakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), sedangkan pada penelitian ini Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi variabel intervening yang mengantarai Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, penelitian Safitri *et al.* menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai variabel intervening, sedangkan pada penelitian ini variabel *intervening* yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan pengembangan dari penelitian Dewi (2021) dan Safitri *et al.* (2021) di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening.

Isu tentang pelaporan keuangan pemerintah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada kenyataannya, terdapat fenomena menguatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan manajemen pemerintahan pusat dan daerah yang lebih baik. Selain itu, peneliti memfokuskan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), alasannya karena laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan SKPD sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tergantung pada kualitas laporan keuangan SKPD di dalamnya. Peneliti memilih Kantor Walikota Medan sebagai tempat penelitian karena kebutuhan informasi akan hasil audit LKPD Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada SKPD di Kantor Walikota Medan)"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, maka peneliti menentukan identifikasi masalah pada:

1. Adanya pegawai yang memiliki pengetahuan terbatas pada pemanfaatan teknologi informasi yang disediakan.
2. Adanya permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal.
3. Adanya pegawai yang tidak melakukan budaya organisasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti menentukan beberapa rumusan masalah dari identifikasi masalah serta batasan yang masalah pada penelitian ini, beberapa rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal?

3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal pengendalian daerah?
7. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadikan tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap sistem pengendalian internal.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap sistem pengendalian internal.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal pengendalian daerah.
7. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian internal pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat yakni:

1. Manfaat Akademis

a. Mahasiswa Jurusan Akuntansi, sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan terkait Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
b. Peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.
c. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan terhadap respon pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat, bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya informasi laporan keuangan di pemerintah daerah.

b. Pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pihak pemerintah daerah/kota dalam mengevaluasi laporan keuangan dan dapat menjadi masukan sebagai bahan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Ada banyak perspektif dan cara yang berbeda untuk melihat bagaimana kebijakan publik diterapkan. Salah satunya adalah pendekatan masalah implementasi yang ditawarkan oleh Edward III (1980) dalam Tahir (2014). Dia memulai pendekatan ini dengan mengajukan dua pertanyaan utama: (i) komponen apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) komponen apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Empat syarat utama keberhasilan proses implementasi ditetapkan berdasarkan kedua pertanyaan tersebut. Mereka adalah komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor ini sangat penting untuk implementasi kebijakan.

Komunikasi program hanya dapat berjalan dengan baik jika pelaksana memiliki pemahaman yang jelas. Ini mencakup proses pengiriman informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi. Sumber daya terdiri dari empat elemen: karyawan yang cukup secara kuantitas dan kualitas, informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan. Komitmen pelaksana terhadap program dikenal sebagai disposisi pelaksana atau sikap pelaksana. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional yang mengatur

pelaksanaan kebijakan dan tata aliran pekerjaan. Penyebaran kebijakan harus dilakukan dengan baik untuk mempercepat pelaksanaannya.

Dalam PP nomor 71 tahun 2010, pemerintah menetapkan bahwa laporan keuangan harus berkualitas tinggi. Ini menunjukkan hubungan antara teori implementasi kebijakan publik dan penelitian ini (Ternalemta et al., 2021). Dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah, Kantor Walikota Medan memberikan laporan keuangan yang baik. Menurut PP nomor 71 tahun 2010, pelaksanaan kebijakan dalam hal ini akan berhasil jika didukung oleh faktor-faktor berikut: faktor sumber daya, yang mencakup sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi; faktor struktur birokrasi, yang dievaluasi melalui kebijakan pengendalian internal pemerintah, yang mencakup strandar operasional prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

2.1.2 Teori Keagenan

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas publik berarti bahwa pemegang amanah (*agent*) harus bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menunjukkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan dan tindakan yang bertanggung jawab kepada pemberi amanah (*principal*), yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Ada dua jenis akuntabilitas publik: akuntabilitas vertikal mengacu pada pertanggungjawaban kepada pihak berwenang yang lebih tinggi atas pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas horizontal mengacu pada pertanggungjawaban kepada masyarakat secara keseluruhan.

Teori keagenan adalah dasar dari praktik pelaporan keuangan organisasi sektor publik, yang berkaitan dengan masalah keagenan. Rosalin (2011) menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan, pemerintah sebagai agen bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Pengguna informasi ini berfungsi sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil mereka.

Di negara demokrasi, hubungan antara pemerintah dan orang-orang yang menggunakan informasi keuangan pemerintah disebut sebagai hubungan keagenan. Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan hubungan antara *principal*, yang merupakan Pemerintah Kota Medan sendiri, dan *agent*, yang merupakan aparatur pemerintahan tersebut. Pengendalian internal memastikan bahwa agent dapat mematuhi kepentingan dan keputusan *principal*, dan agar *agent* selalu bertindak sesuai dengan arahan dan tujuan *principal* (Nurillah, 2014).

2.1.3 Teori *Technology Acceptance Model* (TAM)

Menurut teori Davis (1986), *Technology Acceptance Model* (TAM) diciptakan untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Model TAM berasal dari teori psikologis yang menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang terdiri dari kepercayaan, sikap, niat, dan hubungan perilaku pengguna. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi pengguna tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi sebagai suatu

tindakan. Jika seseorang melihat kegunaan dan kemudahan penggunaan teknologi informasi sebagai suatu tindakan, mereka akan memutuskan untuk melakukan sesuatu.

Konsep TAM memberikan dasar untuk studi tentang bagaimana pemakai menggunakan dan menerima sistem informasi. Tujuan dari model ini adalah untuk menjelaskan komponen penting dari perilaku pengguna TI dan bagaimana mereka menerima teknologi. Diharapkan bahwa pengembangan konsep TAM akan membantu memprediksi sikap dan penerimaan teknologi seseorang dan memberikan informasi dasar yang diperlukan tentang hal-hal yang mendorong sikap tersebut. TAM berteori bahwa dua faktor menentukan keinginan seseorang untuk menggunakan sistem atau teknologi: persepsi kemanfaatan, yang merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan meningkatkan kinerjanya, dan persepsi kemudahan penggunaan, yang merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan teknologi akan membuatnya lebih mudah menyelesaikan tugas.

Teori TAM bertujuan untuk memberikan informasi tentang alasan pencatatan menggunakan teknologi informasi. Dalam kasus ini, penggunaan teknologi informasi, terutama bagian keuangan dan akuntansi di SKPD di Kantor Walikota Medan, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi informasi oleh aparatur pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan (Iwan, 2022).

2.1.4 *Resource Based Theory* (RBT)

Menurut (Wernerfelt, 1984), *Resources Based Theory* (RBT) adalah suatu teori yang dikembangkan guna menggambarkan sebuah keunggulan bagi instansi yang menyatakan bahwasanya keunggulan bersaing akan tercipta apabila sebuah instansi mempunyai sumber daya profesional yang tidak ada di perusahaan lainnya. Berdasarkan konsep resource based theory, jika instansi mampu mengelola sumber daya secara efektif maka akan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaing.

Bisnis memiliki keunggulan kompetitif dalam hal sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang tinggi. Jika mereka dapat memanfaatkan dan mengelola potensi yang dimiliki oleh karyawan mereka dengan baik, mereka dapat meningkatkan produktivitas mereka. Peningkatan produktivitas akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Teori berbasis sumber daya dikaitkan dengan penelitian ini bahwa instansi yang memiliki sumber daya yang unggul dapat berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Nilai tambah bagi organisasi dapat diperoleh dari sumber daya penelitian, seperti keterampilan SDM dan pengetahuan teknologi. di era globalisasi saat ini, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Ini berarti, pengetahuan para aparatur SKPD di Kantor Walikota Medan tentang penggunaan teknologi yang dirasa sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan menjadi penentu kualitas dan mutu suatu hasil laporan keuangan yang ada di sektor pemerintah daerah. Semakin bermutu suatu informasi keuangan pemerintah daerah, semakin sedikit pula

kelemahan yang ditemukan dalam suatu lembaga disaat adanya pemeriksaan audit oleh pihak terkait (Hadis, 2022).

2.2 Uraian Teoritis

2.2.1 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Ratmono & Sholihin (2017), laporan keuangan merupakan salah satu cara pemerintah bertanggung jawab atas bagaimana uang daerah digunakan untuk menjalankan otonomi daerah dan menjalankan operasi pemerintahan. Pada akhir tahun anggaran, ini digunakan sebagai ukuran kinerja pemerintah. Harahap (2011) mengatakan bahwa analisis laporan keuangan berarti memecah akun laporan keuangan menjadi bagian informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan antara data kuantitatif dan nonkuantitatif yang signifikan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi keuangan, yang sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Menurut Laudon (2012), sistem informasi yang berkualitas adalah sistem yang memadukan efisiensi teknis dengan kepekaan terhadap kebutuhan organisasi dan manusia, yang menghasilkan kepuasan kerja yang tinggi dan produktivitas.

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli seperti Dwi dan Mahfud (2017), Harahap (2011), dan Laudon (2012), dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh entitas pelaporan (Setiani, 2021).

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Didalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa pemerintah harus menyajikan empat komponen laporan keuangan. Berikut adalah empat komponen laporan keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2. Neraca

Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu, menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitasnya. Dalam neraca, setiap entitas mengkategorikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar, dan kewajibannya dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ini karena menggunakan sistem berbasis akrual untuk menyusun neraca.

3. Laporan Arus Kas

Pelaporan arus kas dimaksudkan untuk menunjukkan sumber, penggunaan, perubahan, dan saldo kas selama periode akuntansi, serta saldo dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan atau giro atau yang dipegang secara tunai oleh bendahara. Sebaliknya, setara kas pemerintah digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang jangka pendek.

Investasi jangka pendek harus dapat segera dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang jelas tanpa menimbulkan risiko perubahan nilai yang signifikan untuk memenuhi persyaratan setara kas. Oleh karena itu, suatu investasi dianggap setara kas jika memiliki masa jatuh tempo tiga (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara (Pratama, 2022).

c. Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah

Para pemakai laporan keuangan harus menemukan informasi bermanfaat. Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan dapat menggunakan neraca untuk membuat keputusan tentang strategi apa yang akan digunakan untuk keberhasilan bisnis. Laporan laba rugi membantu perusahaan melihat prospek di masa depan, sedangkan laporan arus kas membantu pemakai laporan keuangan mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dan apakah itu baik atau buruk. Laporan arus kas juga akan membantu pengguna laporan keuangan memahaminya dengan baik sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

Zulkarnain & Ningrum (2020) menyatakan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memberikan pemahaman dan informasi lebih tentang

manajemen dan kondisi perusahan itu sendiri Kualitas laporan keuangan yang baik memiliki empat karakteristik yaitu 1) Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 2) Andal, penggunaan informasi tersebut dapat dicegah Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. 3) Dapat Dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. 4) Dapat Dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Yuliantari, 2023).

2.2.2 Teknologi Informasi

Saat ini, teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan bagi semua organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, kemajuan teknologi dapat membantu lembaga pemerintah daerah dengan meningkatkan kinerja umum dan memungkinkan berbagai tugas dilakukan dengan cepat, tepat, dan tepat (Dewi, 2020). Teknologi informasi adalah sekumpulan alat yang terdiri dari komputer dan komunikasi yang digunakan untuk mengelola data (Nengsy, 2018).

, dan "teknologi informasi" mengacu pada teknologi yang digunakan untuk menyampaikan dan mengelola data. Organisasi swasta dan publik telah mengalami transformasi besar sebagai akibat dari teknologi informasi (Nengsy, 2018). Menurut Alamsyah et al. (2017), teknologi informasi adalah alat yang dapat membantu karyawan membuat laporan keuangan yang akurat dan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan (Damayanti et al., 2024).

2.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Halim et al. (2010) menyatakan bahwa sumber daya manusia sangat penting untuk keberlangsungan organisasi pemerintah. Kualitas dan kemampuan pegawai sangat menentukan kinerja organisasi karena mereka tidak dapat digantikan oleh elemen lain. Oleh karena itu, manajemen pegawai negeri sipil sangat penting. Menurut Rohida (2018), pengetahuan dan keterampilan pegawai dapat dikembangkan dengan mudah dengan berpartisipasi dalam program pendidikan dan pelatihan. Ini akan meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai saat melakukan tugas sehari-hari.

Basri & Johannes (2022) juga menyatakan bahwa peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mereka dapat mengikuti perkembangan zaman saat ini, yang berada dalam revolusi industri keempat. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap (perilaku) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya

sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien. Sebagai subjek pelaksanaan kebijakan dan kegiatan operasional organisasi, sumber daya manusia merupakan aset penting.

Hului et al. (2023) dalam penelitiannya juga menyebutkan, tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, Pemerintah Daerah mengalami hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas di lingkungan kerjanya. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas bagi pemerintah adalah dengan mempersiapkan sumber daya aparatur pemerintah yang mampu berfikir logis, rasional, dan mampu melaksanakan tugas- tugas pokok dan fungsi pada pemerintahan dengan baik. Sumber daya manusia dengan keahlian akuntansi dan keuangan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berkualitas dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah. Akibatnya, laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat diandalkan dapat dibuat. Pegawai Negeri Sipil dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka melalui program pendidikan dan pelatihan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Zulfahmi et al. (2020) menyatakan bahwa penempatan karyawan yang tepat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi karyawan untuk memenuhi tugas organisasi. Pegawai yang dipekerjakan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi organisasi. Kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh kesesuaian karyawan pada tingkat pendidikan dan bidang (Rahayu & Yuditiya, 2023).

2.2.4 Pengendalian Internal

Arens et al. (2012) menyatakan bahwa pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberi manajemen keyakinan yang cukup bahwa perusahaan akan mencapai tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kesimpulan dari definisi-definisi tersebut, pengendalian internal difokuskan pada konsep-konsep penting sebagai berikut: (a) Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari pedoman kebijaksanaan formulir, tetapi juga dilakukan oleh karyawan di setiap jenjang perusahaan; (b) Pengendalian internal harus sesuai dengan tujuan kepatuhan aturan, pelaporan keuangan, dan operasi; dan (c) Pengendalian adalah proses untuk mencapai tujuan tertentu sebuah entitas.

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2008).

Adapun tujuan sistem pengendalian internal manurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang: 1) Kegiatan yang efektif dan efisien, 2) Laporan keuangan yang dapat diandalkan, 3) Pengamanan aset Negara, 4) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2008).

Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 (BPK RI, 2008), adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian

Kurniawan (2012) menyatakan bahwa keadaan yang ada di dalam suatu organisasi akan memengaruhi kinerja pengendalian internal secara keseluruhan karena faktor-faktor ini memengaruhi pemahaman setiap karyawan tentang pentingnya pengendalian. Gaya operasi manajemen (progresif atau konservatif) dan filosofi manajemen (tunggal dalam persekutuan atau bersama dalam perseroan) adalah beberapa komponen yang memengaruhi lingkungan pengendalian.

2. Penilaian risiko

Arens et al. (2012) menjelaskan bahwa perusahaan harus melakukan penilaian risiko (*risk assessment*), untuk menemukan, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan dan desain serta implementasi tindakan pengendalian. Tujuan dari penilaian risiko adalah untuk mengurangi risiko seminimal mungkin untuk mempertimbangkan biaya dan keuntungan. Tujuan penilaian risiko dilakukan oleh manajemen adalah untuk menentukan bagaimana mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, menilai risiko yang cukup signifikan, dan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk me-manage risiko.

3. Kegiatan pengendalian

Arens et al. (2012) mendefinisikan aktivitas pengendalian sebagai aturan, prosedur, metode, dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan instruksi manajemen telah dilaksanakan. Pengendalian melibatkan pembagian tugas yang cukup, otoritas yang tepat atas transaksi dan aktivitas, pencatatan dan dokumentasi yang cukup, pengendalian fisik atas aset dan catatan, dan evaluasi independen atas kinerja.

4. Informasi dan komunikasi

Arens et al. (2012) menjelaskan bahwa informasi dicatat dan dikomunikasikan dalam jangka waktu kepada manajemen dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Ini memungkinkan pengendalian internal dan tanggung jawab tambahan terhadap informasi tersebut. Seperti tujuan audit transaksi, manajemen harus mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

5. Pemantauan pengendalian intern

Arens et al. (2012) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses yang mengevaluasi kualitas kinerja penerapan pengendalian intern secara konsisten. Proses ini mencakup pengambilan tindakan evaluasi serta penentuan desain dan operasi pengendalian secara tepat waktu. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang terjadi secara terus menerus, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya. Auditor intern atau personel yang memiliki tugas yang serupa memantau operasi entitas. Aktivitas pemantauan dapat mencakup pengumpulan data dan komunikasi dengan pihak ketiga, seperti keluhan kostumer dan komentar dari badan pengatur. Ini dapat membantu menunjukkan masalah atau area yang perlu diperbaiki (Octaviana, 2023).

2.3 Penelitian Terdahulu

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu adanya perbedaan variabel dependen dalam penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Berbedanya tempat riset yang dilakukan sehingga hasil yang diperoleh juga berbeda karena hambatan-hambatan atau kendala yang dialami oleh

subjek penelitian terdahulu dan sekarang juga berbeda. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian yang berbeda dengan penelitian sekarang ini.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu (nasional)

no	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ridzal, Nining Asniar Sujana, I Wayan Malik, Ernawati (2022)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan	Kuantitatif	Hasil pengujian hipotesis yang kedua menemukan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai signifikansi yang diperoleh untuk pengaruh PTI terhadap KLK yakni sebesar 0,007 < nilai α sama dengan 0,05. Hal ini menunjukkan hipotesis tersebut diterima. kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi (Ridzal et al., 2022).
2.	Yulia Damayanti, Amanda Arifah, Siti (2024)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi, Kompetensi SDM, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kabupaten Kebumen Chaidir Iswanaji	Kualitatif	Hasil dari pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi terhadap kualitas LKPD menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi akuntansi tidak berdampak pada kualitas LKPD. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah belum menggunakan teknologi informasi akuntansi dengan cukup baik (Damayanti et al., 2024).

		Universitas Tidar		
3.	Sijabat, Murdhani Oloan (2023)	PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PERAN AUDIT INTERNAL DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN	Kualitatif	Penerapan system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila penerapan system informasi akuntansi tersebut dapat dipersepsikan dengan baik guna menghasilkan informasi yang bermanfaat. Sistem informasi akuntansi tersebut juga bisa dipergunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan suatu bisnis oleh perusahaan yang akan mendapatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik (Sijabat & Virandi, 2023)
4.	Wijayanti, Nur (2023)	PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	Kuantitatif	Teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sragen. Kehadiran teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti mampu meringankankegiatan yang kompleks dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dipahami dan diuji dalam konteks perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan (Wijayanti, 2018).

		KABUPATEN SRAGEN		
5.	Aprsiansyah, Harry Rahayu, Sri Erwati, Misni (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo	Asosiatif Kausal	Hasil ini menjelaskan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (H4 ditolak). Dalam penelitian ini pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan (Aprsiansyah et al., 2020).
6.	Rahayu, Sri Yuditiya, Anggun Iga (2023)	Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi	Kuantitatif	Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Rahayu & Yuditiya, 2023).
7.	Ternalemta Kalangi, Lintje Tinangon, Jantje J. (2021)	Sumber Daya Manusia, Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas	Kuantitatif	Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kodam XIII/Merdeka. Hal ini berarti, adanya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Kodam XIII//Merdeka akan tercipta laporan keuangan yang

		Laporan Keuangan		berkualitas (Ternalemta et al., 2021).
8.	Octaviana, Ade Rani (2023)	PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DENGAN PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING	Kuantitatif	Teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengendalian intern. Sedangkan Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, kompetensi Sumber Daya Manusia dan pengalaman kerja tidak memberikan pengaruh langsung terhadap pengendalian intern (Octaviana, 2023).
9.	Nurfa Setiani, Dhea (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kualitatif	Sistem informasi akuntansi memiliki konstribusi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dihasilkan (Setiani, 2021).
10.	Rizka S, Anggie Zamzami, Zamzami Gowon, Muhammad (2021)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan	Kuantitatif	Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemanfaatan SIA dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pengelolaan data serta memiliki kontribusi yang

		Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening		kuat terhadap. Kualitas LKPD sehingga dapat digunakan.sebagai.pengambilan. keputusan. Namun hal itu saja tidak. cukup karena sistem informasi akuntansi juga membutuhkan kontrol oleh para aparat apabila tidak dikontrol dengan baik maka sistem komputerisasi akan mudah mengalami kendala yang akan menghambat proses pelaporan keuangan yang berkualitas (Safitri et al., 2021).
11.	Dewi, Ni Putu Riska Fernanda (2021)	PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang secara teori mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti tingkat pemahaman akuntansi dan pengalaman kerja (Dewi, 2021)

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirancang untuk memberikan gambaran teoritis yang menghubungkan antar variabel yang terkait dengan fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel independen, yaitu Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi, dan Kompetensi SDM terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervensi. Adapun gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

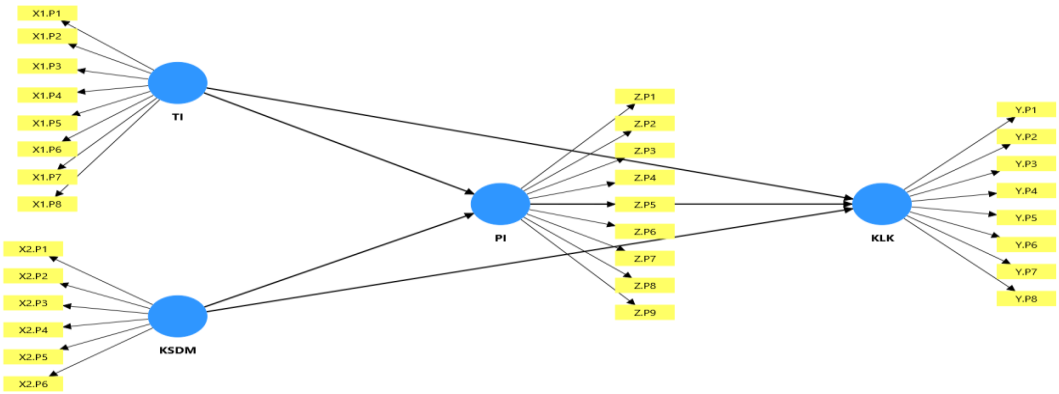

Gambar 2.1 Kerangka konseptual

2.5 Hipotesis

Para ahli dari berbagai perspektif memberikan definisi hipotesis dalam berbagai literatur. Hipotesis, menurut Rogers (1960) adalah asumsi tunggal yang digunakan untuk membuat teori atau eksperimen dan diuji. Hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen digambarkan dalam Hipotesis. Menurut Creswell (2017), hipotesis adalah solusi temporer yang akan diuji dengan penelitian (Yam & Taufik, 2021).

Berdasarkan uraian dari definisi beberapa ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam hipotesis terdapat beberapa komponen penting yakni dugaan sementara, hubungan antara variabel dan uji kebenaran. Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Sistem Pengendalian Internal

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang dapat digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Penelitian Saputra (2021) dan Octaviana (2023) menunjukkan hasil bahwa teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Hal ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan memperkuat sistem pengendalian internal yang berbasis pemenfaatan teknologi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_1: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Sistem Pengendalian Internal

Dalam penerapan SPIP, tingkat efektifitas pengendalian internal diukur berdasarkan terpenuhinya lima kategori yaitu; terciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, terseleanggarakan aktivitas

pengendalian, terselenggarakannya sistem informasi dan komunikasi, dan terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Dalam Octaviana (2023) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa, tidak adanya pengaruh langsung yang signifikan antara kompetensi sumber daya manusia dengan pengendalian internal. Sedangkan Koto (2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_2: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Sistem Pengendalian Internal.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shofa et al. (2022) dan Puspita & Ariani (2023) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Octaviana (2023) menyatakan, tidak adanya pengaruh langsung yang signifikan dari teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_3: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Irafah et al. (2020) dan Octaviana (2023) mengatakan bahwa kompetensi SDM mempunyai pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_4: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian Imelia et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem pengedalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Shofa et al. (2022), Setyaningrum & Haryanto (2024) menunjukkan adanya pengaruh sistem pengendalian internal yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_5: Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

6. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening

Penerapan SPIP secara optimal oleh SDM dan terkomputerisasi dapat menunjang pengendalian Internal lebih efektif dan efisien, karena semua SOP dapat tercapai dan kemungkinan terjadinya kecurangan sangat kecil sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saputra (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel intervening yaitu pengendalian internal mampu berperan dalam mengantarai hubungan antara

variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_6: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening.

7. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengedalian Internal sebagai Variabel Intervening

Saputra (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa, sistem pengendalian internal mampu mengantarai pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Koto (2019) menyatakan sebaliknya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka hipotesis alternatif sebagai berikut:

H_7: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Sistem Pengendalian Intern.